



Di Nusa Penida

# Pengelolaan Permohonan

# Tanah Negara Marak

Semarang (Bali Post) -

Ratusan hektar tanah negara di Kecamatan Nusa Penida belum bersertifikat. Keberadaan tanah negara ini pun sering menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat. Apalagi kasus jual beli tanah negara di kecamatan kepulauan ini semakin santer berhembus. Belakangan permohonan pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat Nusa Penida ini banyak diterima Pemkab Klungkung.

Menyikapi hal ini, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mengaku akan melakukan kajian secara detail. Pihaknya belum berani memberikan sikap terkait dugaan ada jual beli tanah negara di Nusa Penida. "Saya baru sebatas mendengar kasus tersebut dan belum mendapatkan bukti-buktinya," ujarnya.

Namun, ia mengakui kini banyak masyarakat Nusa Penida yang memohon menggunakan tanah negara ke Pemkab Klungkung.

"Untuk kepentingan umum dan adat pasti kami pertimbangkan. Prinsipnya semua permohonan yang masuk akan dipelajari agar jelas peruntukannya," ujarnya.

Permohonan tanah negara ini tidak hanya terjadi di era kepemimpinan Nyoman Suwirta. Hal serupa juga terjadi zaman mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra.

Terkait permohonan tanah negara, Bupati Suwirta memastikan akan menolak permohonan tanah

negara yang ditujukan untuk kepentingan pribadi. Sejumlah usulan yang telah diberikan rekomendasi hanya permohonan tanah negara untuk kepentingan umum. Di antaranya, pemanfaatan tanah negara untuk kuburan dan sebuah pura. "Satu yang sudah saya berikan rekomendasi yaitu Setra Banjar Nyuh. Saya percepat statusnya supaya tanah setra tidak diklaim atau diperebutkan," ujarnya.

Pihaknya mengaku banyak aset yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pariwisata Nusa Penida. Hanya saja, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan agar masyarakat bisa memanfaatkannya dengan baik. Pasalnya sampai saat ini masih terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan lahan-lahan yang belum bersertifikat tersebut. (dwa)

Edisi : Senin, 11 Mei 2015

Hal : 16



*Tak Berizin*

## *Banyak Bangunan Caplok Tanah Negara*

**Semarapura (Bali Post) -**

Pemkab Klungkung didesak segera melakukan pendataan bangunan di kawasan wisata Lembongan. Ditengara, saat ini banyak bangunan tidak berizin yang dibangun sejumlah investor di Nusa Lembongan dibangun di atas tanah negara di kawasan hutan mangrove. Jika ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan hutan mangrove dan kawasan pantai menjadi rusak.

Bendesa Adat Jungut Batu, Nusa Lembongan, Klungkung Jero Ketut Gunaksa belum lama ini mempertanyakan keberadaan bangunan tidak berizin yang ada di kawasan hutan mangrove Desa Jungut Batu. Pasalnya, tanah yang dimiliki negara tersebut banyak dibangun penginapan dan restoran. Bahkan di kawasan itu juga terdapat kolam renang yang ada di pesisir pantai.

Menurut Jero Ketut Gunaksa, bangunan penginapan dan restoran tersebut sebenarnya dimiliki oleh orang luar baik itu warga negara asing atau pun investor domestik. Mereka mengatasnamakan warga Jungut Batu untuk memanfaatkan lahan mangrove tersebut secara ilegal. "Saya tidak bisa mengambil tindakan karena bukan ranah saya. Di sana sudah ada penginapan, restoran bahkan kolam renang di pinggir pantai yang seharusnya dilarang," beber Jero Ketut Gunaksa.

Pihaknya mempertanyakan kinerja dari Pemkab Klungkung terkait masalah ini. Pasalnya, keberadaan bangunan liar tersebut seakan dilakukan pembiaran oleh pemerintah tanpa adanya penindakan lebih lanjut. "Kenapa seolah ada pembiaran. Sudah lama pembiaran ini bahkan sejak periode Bupati Klungkung yang dulu kasus ini tidak kunjung selesai," ungkapnya. (dwa)

Edisi : Senin, 11 Mei 2015

Hal : 6